

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

**44/SOP-Disdukcapil/2021
AKTA PERKAWINAN**

**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cimahi Utara Kota Cimahi**

44. AKTA PERKAWINAN

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	NOMOR SOP	44/SOP-Disdukcapil/2021
	TGL PEMBUATAN	02 Juni 2021
	TGL REVISI	01 Juli 2021
	TGL EVEKTIF	02 Agustus 2021
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>  <p>Dra. IPAH LATIPAH, M.Si Pembina TKI NIP. 196502271991022001</p>
DASAR HUKUM	NAMA SOP	AKTA PERKAWINAN
		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Perundang-Undangan tentang Pencatatan Sipil; Memahami tentang Administrasi Kependudukan; Mengetahui tentang Teknologi Informasi. 	

<p>6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi.</p>	
NAMA PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN
Akta Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP dan KK mempelai - Akta Kelahiran mempelai - Surat Pernyataan belum pernah kawin - Pas photo 4x6 berdampingan - KTP 2 orang saksi - Surat keterangan Pernikahan dari agama/penghayat
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>1. SOP Penerbitan Akta Kelahiran</p> <p>2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga</p> <p>3. SOP Penerbitan KTP-El</p>	<p>1. Komputer</p> <p>2. Server</p> <p>3. Printer</p> <p>4. ATK</p> <p>5. Jaringan Komunikasi data</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatkan tidak tertib administrasi kependudukan	Pengumpulan, inventarisasi dan pengarsipan

Flowchart SOP Akta Perkawinan

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan	Operator Pengelola SIAK	Verifikator	KASI Perkawinan dan Perceraian	KABID CAPIL	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima, memverifikasi permohonan dokumen Akta Perkawinan							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP dan KK mempelai - Akta Kelahiran mempelai - Pas photo 4x6 berdampingan - KTP 2 orang saksi - Surat keterangan menikah dari agama - 	15 menit	Formulir Dokumen Permohonan	
2.	Memproses surat pengumuman dan penjadwalan pencatatan perkawinan							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP dan KK mempelai - Akta Kelahiran mempelai - Pas photo 4x6 berdampingan - KTP 2 orang saksi - Surat keterangan menikah dari agama 	15 menit	Surat pengumuman jadwal perkawinan	
3.	Memverifikasi, memvalidasi dan dokumen Akta Perkawinan							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP dan KK mempelai - Akta Kelahiran mempelai - Pas photo 4x6 berdampingan - KTP 2 orang saksi - Surat keterangan menikah dari agama 	15 menit	Berkas permohonan	

4.	Identifikasi, validasi pasangan dan saksi serta dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan							- Surat pengumuman jadwal perkawinan Berkas permohonan	10 menit	Berkas permohonan	
5.	Melakukan konsolidasi, input data dan mencetak Draft Kutipan Akta Perkawinan							- Surat pengumuman jadwal perkawinan Berkas permohonan	10 menit	- Berkas permohonan - Draft	
6.	Melakukan verifikasi Draft Kutipan Akta Perkawinan				T	Y		- Berkas permohonan - Draft	5 menit	- Berkas permohonan - Draft	
7.	Mencetak kutipan dan Buku Register Akta Perkawinan							- Berkas permohonan - Draft	5 menit	- Berkas permohonan - Draft - Akta Perkawinan - Buku Register	
8.	Melakukan verifikasi legalitas Kutipan Akta Perkawinan dan Buku Register				T			- Berkas permohonan - Draft - Akta Perkawinan Buku Register	5 menit	- Berkas permohonan - Draft - Akta Perkawinan - Buku Register	
9.	Menandatangani kutipan dan Buku Register Akta Perkawinan							- Kutipan - Register	5 menit	- Kutipan - Buku Register	

45. SURAT KETERANGAN PERJANJIAN KAWIN

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	NOMOR SOP	45/SOP-Disdukcapil/2021
	TGL PEMBUATAN	02 Juni 2021
	TGL REVISI	01 Juli 2021
	TGL EVEKTIF	02 Agustus 2021
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>  <p>Dra. IPAH LATIPAH, M.Si Pembina TK.I NIP. 196502271991022001</p>
	NAMA SOP	SURAT KETERANGAN PERJANJIAN KAWIN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Perundang-Undangan tentang Pencatatan Sipil; Memahami tentang Administrasi Kependudukan; Mengetahui tentang Teknologi Informasi. 	

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

**45/SOP-Disdukcapil/2021
SURAT KETERANGAN PERJANJIAN KAWIN**

**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cimahi Utara Kota Cimahi**

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;	
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan taat cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;	
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi.	
NAMA PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN
Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Ktp Dan Kk Mempelai - Akta Perjanjian Kawin Dari Notaris yang dilegalisir - Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penerbitan Akta Kelahiran 2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga 3. SOP Penerbitan KTP-El	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatkan tidak tertib administrasi kependudukan	Pengumpulan, inventarisasi dan pengarsipan

Flowchart SOP Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan	Operator Pengelola SIAK	Verifikator	KASI Perkawinan dan Perceraian	KABID CAPIL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima, memverifikasi permohonan dokumen surat perjanjian perkawinan						<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP dan KK mempelai - Fotocopi Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang dilegalisir - Kutipan akta perkawinan suami dan istri 	15 menit	Formulir Dokumen Permohonan	
2.	Memproses surat pengumuman dan penjadwalan pencatatan perkawinan						<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP dan KK mempelai - Fotocopi Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang dilegalisir - Kutipan akta perkawinan suami dan istri 	15 menit	Surat pengumuman jadwal perkawinan	
3.	Memverifikasi, memvalidasi dan dokumen Akta Perkawinan dan Catatan Pinggir Perjanjian Kawin				T	Y	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP dan KK mempelai - Fotocopi Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang dilegalisir - Kutipan akta perkawinan suami dan istri 	15 menit	Berkas permohonan	
4.	Melakukan konsolidasi, input data dan mencetak Draft Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Pinggir Perjanjian Kawin						<ul style="list-style-type: none"> - Surat pengumuman jadwal perkawinan - Berkas permohonan 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Draft 	

5.	Melakukan verifikasi Draft Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Pinggir Perjanjian Kawin						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Draft - Catatan pinggir 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Draft 	
6.	Melakukan verifikasi legalitas Kutipan Akta Perkawinan, Catatan Pinggir Perjanjian Kawin dan Buku Register						<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Draft - Akta Perkawinan Buku Register 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Draft Akta Perkawinan dan Catatan Pinggir Perjanjian Kawin - Buku Register 	

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

**46/SOP-Disdukcapil/2021
PENERBITAN KUTIPAN KEDUA KALI AKTA PERKAWINAN**

**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cimahi Utara Kota Cimahi**

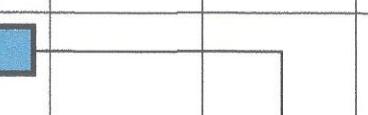
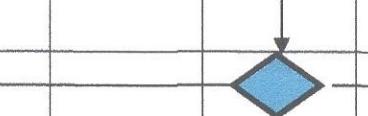
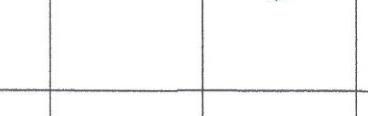
46. PENERBITAN KUTIPAN KEDUA AKTA PERKAWINAN

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	NOMOR SOP	46/SOP-Disdukcapil/2021
	TGL PEMBUATAN	02 Juni 2021
	TGL REVISI	01 Juli 2021
	TGL EVEKTIF	02 Agustus 2021
	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	 Dra. IPAH LATIPAH, M.Si Pembina TK.I NIP. 196502271991022001
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PENERBITAN KUTIPAN KEDUA AKTA PERKAWINAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Perundang-Undangan tentang Pencatatan Sipil; Memahami tentang Administrasi Kependudukan; Mengetahui tentang Teknologi Informasi. 	

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;	
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan taat cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi.	
NAMA PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN
Penerbitan Kutipan Kedua Akta Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Photocopy Kutipan Akta Perkawinan - Berita Acara Keabsahan dari Dinas Pembuat Akta - Surat Kehilangan dari Kepolisian
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 2. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Server 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Jaringan Komunikasi Data
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatkan tidak tertib administrasi kependudukan	Pengumpulan, inventarisasi dan pengarsipan

Flowchart SOP Penerbitan Kutipan Kedua Akta Perkawinan

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan	Operator Pengelola SIAK	Verifikator	KASI Perkawinan dan Perceraian	KABID CAPIL	KEPALA DINAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima dan memverifikasi permohonan kutipan kedua kali akta Perkawinan							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Photocopy Kutipan Akta Perkawinan - Fc KK dan KTP-El ybs - Berita Acara Keabsahan dari Dinas yang mengeluarkan Akta Perkawinan - Surat Kehilangan dari Kepolisian 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Dokumen Permohonan 	
2.	Melakukan konsolidasi, input data dan mencetak Draft dokumen kutipan kedua kali akta Perkawinan							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Photocopy Kutipan Akta Perkawinan - Fc KK dan KTP-El ybs - Berita Acara Keabsahan dari Dinas yang mengeluarkan Akta Perkawinan - Surat Kehilangan dari Kepolisian 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Dokumen Permohonan 	
3.	Melakukan verifikasi legalitas dokumen dan draft kutipan kedua kali akta Perkawinan							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Photocopy Kutipan Akta Perkawinan - Fc KK dan KTP-El ybs - Berita Acara Keabsahan dari Dinas yang mengeluarkan Akta Perkawinan - Surat Kehilangan dari Kepolisian 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Draft surat keterangan - siap cetak 	

4.	Mencetak Kutipan Akta Perkawinan							- Server - Komputer - Jaringan Komunikasi Data	2 menit	- Dokumen permohonan
5.	Melakukan verifikasi legalitas Kutipan Akta Perkawinan dan buku register							- Berkas Permohonan - Kutipan Akta Perkawinan - Buku Register	3 menit	- Dokumen permohonan - Buku Register
6.	Memaraf dokumen kutipan kedua kali perkawinan							- Berkas Permohonan - Kutipan Akta Perkawinan - Buku Register	3 menit	- Dokumen permohonan
7.	Menandatangani Kutipan Akta Perkawinan							- Akta Perkawinan Kutipan Kedua	2 menit	- Dokumen permohonan - Buku Register

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

**47/SOP-Disdukcapil/2021
PENERBITAN PELAPORAN PERKAWINAN LUAR NEGERI**

**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cimahi Utara Kota Cimahi**

47. PENERBITAN PELAPORAN PERKAWINAN LUAR NEGERI

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	NOMOR SOP	47/SOP-Disdukcapil/2021
	TGL PEMBUATAN	02 Juni 2021
	TGL REVISI	01 Juli 2021
	TGL EVEKTIF	02 Agustus 2021
	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PENERBITAN PELAPORAN PERKAWINAN LUAR NEGERI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Perundang-Undangan tentang Pencatatan Sipil; Memahami tentang Administrasi Kependudukan; Mengetahui tentang Teknologi Informasi. 	

2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;	
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan taat cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi.	
NAMA PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN
Penerbitan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP, KK dan passpor suami istri - Surat Keterangan Perkawinan dari KBRI - Akta Perkawinan dari negara asal dan terjemahannya
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga 2. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Server 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Jaringan Komunikasi Data
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatkan tidak tertib administrasi kependudukan	Memvalidasi, memverifikasi, memaraf serta pengarsipan

Flowchart SOP Penerbitan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan	Operator Pengelola SIAK	Verifikator	KASI Perkawinan dan Perceraian	KABID CAPIL	KEPALA DINAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima dan memverifikasi dokumen Pelaporan Perkawinan Luar Negeri							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP, KK dan passpor suami istri - Surat Keterangan Perkawinan dari KBRI - Akta Perkawinan dari negara asal dan terjemahannya 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Dokumen Permohonan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri 	
2.	Melakukan konsolidasi, input data dan mencetak Draft dokumen Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP, KK dan passpor suami istri - Surat Keterangan Perkawinan dari KBRI - Akta Perkawinan dari negara asal dan terjemahannya 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Draft surat keterangan - Buku Register Pelaporan Perkawinan Luar Negeri 	
3.	Melakukan verifikasi legalitas dokumen dan Draft dokumen Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri							<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Draft Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Draft surat keterangan - Pelaporan Perkawinan Luar Negeri siap cetak 	
4.	Mencetak dokumen surat keterangan dan Buku Register Pelaporan Perkawinan Luar Negeri							<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Permohonan - Server - Komputer - Jaringan Komunikasi Data 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri 	
5.	Memverifikasi surat keterangan dan Buku Register Pelaporan Perkawinan Luar Negeri							<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri - Buku Register 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Surat Keterangan Pelaporan 	

							Pelaporan Perkawinan Luar Negeri		Perkawinan Luar Negeri - Buku Register Pelaporan Perkawinan Luar Negeri	
6.	Memaraf dokumen Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri						<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri - Buku Register Pelaporan Perkawinan Luar Negeri 	3 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri - Buku Register Pelaporan Perkawinan Luar Negeri 	
7.	Menandatangani surat keterangan dan Buku Register Pelaporan Perkawinan Luar Negeri						<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri - Buku Register Pelaporan Perkawinan Luar Negeri 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri - Buku Register Pelaporan Perkawinan Luar Negeri 	

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

**48/SOP-Disdukcapil/2021
PENERBITAN AKTA PERCERAIAN**

**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cimahi Utara Kota Cimahi**

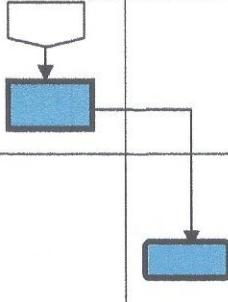
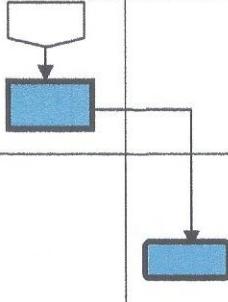
48. PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	NOMOR SOP	48/SOP-Disdukcapil/2021
	TGL PEMBUATAN	02 Juni 2021
	TGL REVISI	01 Juli 2021
	TGL EVEKTIF	02 Agustus 2021
	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PENERBITAN AKTA PERCERAIAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tentang Administrasi Kependudukan; Mampu mengoperasikan Komputer 	

<p>tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan taat cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi.</p>	
NAMA PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN
Penerbitan Akta Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Penetapan Pengadilan Negeri - KTP dan KK pemohon - Akta Perkawinan pemohon
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Akta Kelahiran 2. SOP Penerbitan Akta Perkawinan 3. SOP Penerbitan Kartu Keluarga 3. SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatkan tidak tertib administrasi kependudukan	Pengumpulan, inventaris dan pengarsipan

Flowchart SOP AKTA PERCERAIAN

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan	Operator Pengelola SIAK	Verifikator	KASI Perkawinan dan Perceraian	KABID CAPIL	KEPALA DINAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima, memverifikasi dokumen Akta Perceraian							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Penetapan Pengadilan Negeri - KTP dan KK pemohon - Akta Perkawinan pemohon 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Resi pengambilan 	
2.	Melakukan konsolidasi, input data dan mencetak Draft Akta Perceraian							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Penetapan Pengadilan Negeri - KTP dan KK pemohon - Akta Perkawinan pemohon 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Draft - Kutipan - Buku Register 	
3.	Melakukan verifikasi legalitas dokumen dan Draft Akta Perceraian							<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Draft Akta Perceraian 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Draft - Kutipan - Buku Register 	
4.	Mencetak Akta Perceraian dan Buku Register							<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Draft Akta Perceraian - Buku Register 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Draft - Kutipan - Buku Register 	
5.	Melakukan verifikasi legalitas Akta Perceraian dan Buku Register							<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Draft Akta Perceraian - Buku Register 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Draft - Kutipan - Buku Register 	

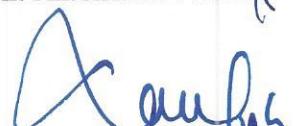
6.	Memaraf dokumen Akta Perceraian							<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Draft Akta Perceraian - Buku Register 	3 menit	<ul style="list-style-type: none"> . Draft . Kutipan . Buku Register 	
7.	Menandatangani Akta Perceraian dan Buku Register							<ul style="list-style-type: none"> - Kutipan - Register 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> . Kutipan . Buku Register 	

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

**49/SOP-Disdukcapil/2021
PENERBITAN KUTIPAN KEDUA KALI AKTA PERCERAIAN**

**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cimahi Utara Kota Cimahi**

49. PENERBITAN KUTIPAN KEDUA AKTA PERCERAIAN

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	NOMOR SOP	49/SOP-Disdukcapil/2021
	TGL PEMBUATAN	02 Juni 2021
	TGL REVISI	01 Juli 2021
	TGL EVEKTIF	02 Agustus 2021
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>  <p>Dra. IPAH LATIPAH, M.Si Pembina TK.I NIP. 196502271991022001</p>
	NAMA SOP	PENERBITAN KUTIPAN KEDUA AKTA PERCERAIAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan tentang Pencatatan Sipil 2. Memahami tentang Administrasi Kependudukan 3. Memahami tentang Teknologi Informasi 	

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;	
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan taat cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi.	
NAMA PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN
Penerbitan Kutipan Kedua Akta Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Photocopy Kutipan Akta Perceraian - KTP orang tua & KK yang bersangkutan - Surat Kehilangan Kepolisian - Berita Acara Keabsahan dari Dinas penerbit perkawinan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penerbitan Akta Perceraian 2. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Server 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Jaringan Komunikasi Data
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatkan tidak tertib administrasi kependudukan	Pengumpulan, inventaris dan pengarsipan

Flowchart SOP Penerbitan Kutipan Kedua Akta Perceraian

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan	Operator Pengelola SIAK	Verifikator	KASI Perkawinan dan Perceraian	KABID CAPIL	KEPALA DINAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima dan memverifikasi permohonan Kutipan Kedua Kali Akta Perceraian							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Photocopy Kutipan Akta Perceraian - Berita Acara Keabsahan dari Dinas Pencetak pertama - KTP & KK ybs - Surat Kehilangan Kepolisian 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Dokumen Permohonan Akta Perceraian 	
2.	Melakukan konsolidasi, input data dan mencetak Draft dokumen Kutipan Kedua Kali Akta Perceraian							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Photocopy Kutipan Akta Perceraian - Berita Acara Keabsahan dari Dinas Pencetak pertama - KTP & KK ybs - Surat Kehilangan Kepolisian 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Permohonan - Draft Akta Perceraian 	
3.	Melakukan verifikasi legalitas dokumen dan draft Kutipan Kedua Kali Akta Perceraian							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Photocopy Kutipan Akta Perceraian - Berita Acara Keabsahan dari Dinas Pencetak pertama - KTP & KK ybs - Surat Kehilangan Kepolisian 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Draft Akta Perceraian 	

4.	Mencetak Kutipan Akta Perceraian			<ul style="list-style-type: none"> - Server - Komputer - Jaringan Komunikasi Data 	2 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kutipan Akta Perceraian - Buku Register 	
5.	Melakukan verifikasi legalitas Kutipan Akta Perceraian dan Buku Register			<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Kutipan Akta Perceraian - Buku Register 	3 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kutipan Akta Perceraian - Buku Register 	
6.	Memaraf dokumen kutipan kedua kali perceraian			<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Kutipan Akta Perceraian - Buku Register 	3 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kutipan Akta Perceraian - Buku Register 	
7.	Menandatangani Kutipan Akta Perceraian			Akta Perceraian Kedua Kali	2 menit	Buku Register	

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

**50/SOP-Disdukcapil/2021
PENERBITAN PELAPORAN PERCERAIAN LUAR NEGERI**

**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cimahi Utara Kota Cimahi**

50. PENERBITAN PELAPORAN PERCERAIAN LUAR NEGERI

 <p>PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	NOMOR SOP	50/SOP-Disdukcapil/2021
	TGL PEMBUATAN	02 Juni 2021
	TGL REVISI	01 Juli 2021
	TGL EVEKTIF	02 Agustus 2021
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>  <p>Dra. IPAH LATIPAH, M.Si Pembina TK.I NIP. 196502271991022001</p>
	NAMA SOP	PENERBITAN PELAPORAN PERCERAIAN LUAR NEGERI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Perundang-Undangan tentang Pencatatan Sipil Memahami tentang Administrasi Kependudukan Memahami tentang Teknologi Informasi 	

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;	
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan taat cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi.	
NAMA PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN
Penerbitan Pelaporan Perceraian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP, KK dan passpor suami istri - Surat Keterangan Perceraian dari KBRI - Akta Perceraian dari negara asal dan terjemahannya
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga 2. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Server 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Jaringan Komunikasi Data
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatkan tidak tertib administrasi kependudukan	Memvalidasi, memverifikasi, memaraf, pengarsipan

Flowchart SOP Penerbitan Pelaporan Perceraian Luar Negeri

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan	Operator Pengelola SIAK	Verifikator	KASI Perkawinan dan Perceraian	KABID CAPIL	KEPALA DINAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima dan memverifikasi dokumen Pelaporan Perceraian Luar Negeri							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP, KK dan passpor suami istri - Surat Keterangan Perceraian dari KBRI - Akta Perceraian dari negara asal dan terjemahannya 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Dokumen Permohonan Pelaporan Perceraian Luar Negeri 	
2.	Melakukan konsolidasi, input data dan mencetak Draft dokumen Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri							<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - KTP, KK dan passpor suami istri - Surat Keterangan Perceraian dari KBRI - Akta Perceraian dari negara asal dan terjemahannya 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Draft surat keterangan dan Buku Register Pelaporan Perceraian Luar Negeri 	
3.	Melakukan verifikasi legalitas dokumen dan Draft dokumen Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri							<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Draft Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri siap cetak 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Draft Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri siap cetak 	
4.	Mencetak dokumen surat keterangan dan Buku Register Pelaporan Perceraian Luar Negeri							<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Permohonan - Server - Komputer - Jaringan Komunikasi Data 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri 	

5.	Memverifikasi surat keterangan dan Buku Register Pelaporan Perceraian Luar Negeri						<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri - Buku Register Pelaporan Perceraian Luar Negeri 	10 menit
6.	Memaraf dokumen Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri						<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri - Buku Register Pelaporan Perceraian Luar Negeri 	2 menit
7.	Menandatangani surat keterangan dan Buku Register Pelaporan Perceraian Luar Negeri						<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan - Surat Keterangan Pelaporan Perceraian Luar Negeri - Buku Register Pelaporan Perceraian Luar Negeri 	10 menit